

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT  
KEONARAN DIMASYARAKAT OLEH KERATON SEJAGAD DI  
PURWOREJO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

**RAHMAT FAJAR MAULANA WIJANARKO**

**C100160041**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT  
KEONARAN DIMASYARAKAT OLEH KERATON SEJAGAD DI  
PURWOREJO**

Oleh:

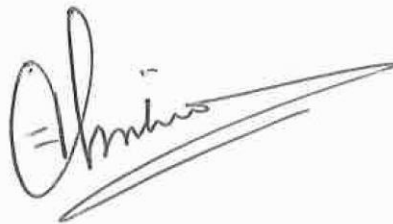
**RAHMAT FAJAR MAULANA WIJANARKO**

**NIM. C.100.160.041**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

**(Hartanto, S.H., M.H)**

**NIK/NIDN. 390/0626115901**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT  
KEONARAN DIMASYARAKAT OLEH KERATON SEJAGAD DI  
PURWOREJO**

**OLEH**

**RAHMAT FAJAR MAULANA WIJANARKO**

**NIM. C100160041**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Pada Hari Selasa, 13 April 2021**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

**Hartanto, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)**

**Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)**

**Sudaryono, S.H., M.Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)**



**Dekan,**



**(Prof. Dr. Kludzaifah Dimyati, S.H., M.H)**

**NIK. /NIDN. 537/0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh.

Surakarta, 10 April 2021

Yang membuat pernyataan,



**RAHMAT FAJAR MAULANA WIJANARKO**

**NIM. C100160041**

## **MOTTO**

*“Jangan Jadikan Perbedaan Pendapat Sebagai Sebab Perpecahan & Permusuhan. Karena Yang Demikian Itu Merupakan Kejahatan Besar Yang Bisa Meruntuhkan Bangunan Masyarakat dan Menutup Pintu Kebaikan di Penjuru Mana Saja.”*

**(K.H Hasyim Asy'ari)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini untuk mereka-mereka sekalian yang selalu bertanya  
kepadaku  
**“Kapan Lulus?”**

**Terlambat lulus bukanlah suatu aib, lulus tidak tepat waktu juga bukan  
suatu bentuk kejahatan. Alangkah buruknya menilai kepintaran seseorang  
dari waktu dan kecepatan dia lulus dalam menimba ilmu. Bukankah Skripsi  
yang baik adalah skripsi yang Selesai, baik tepat waktu maupun tidak tepat  
waktu.**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan  
kemudahan, kesehatan, serta rezeki, bagi  
penulis sehingga dapat memberikan  
kelancaran dalam menyelesaikan Studi.
2. Ayah dan Ibu, tercinta yang selalu  
memberikan doa, dukungan baik berupa  
dukungan materiil maupun non materiil
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum  
2016 Universitas Muhamamdiyah  
Surakarta.

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT KEONARAN DIMASYARAKAT OLEH KERATON SEJAGAD DI PURWOREJO**

## **Abstrak**

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Dalam filsafat bahasa onar memiliki arti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu, keonaran sudah bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Kata onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa onar mencakup kejadian huru hara, gempa, keributan, kegaduhan, yang dapat berupa huru hara fisik ataupun kegemparan non fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat. Yang membedakan antara Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 45 Undang-Undang ITE adalah media yang digunakan untuk menyebarkan dan akibat dari yang ditimbulkan dari berita yang disebarkan juga menjadi pembeda, yang pertama diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, apabila seseorang menyebarkan berita bohong dengan sengaja dan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, yang kedua apabila seseorang menyebarkan berita bohong dengan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu ras, suku, atau agama tertentu. Pemenuhan unsur-unsur juga didukung dengan berbagai alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Keonaran, Kerajaan Fiktif

## **JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS MAKES PUBLIC DISMAY BY KERATON SEJAGAD IN PURWOREJO**

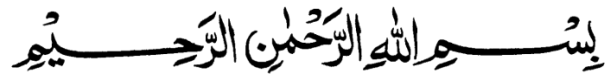
### **Abstract**

Crimes are always formulated in the form of sentences. In the sentence it contains an element called the complexity of the elements. These elements form a legal understanding of a particular type of crime. Fake news is news that does not correspond to the real truth (*materiele waarheid*). Spreading false news can't be directed at one particular person or another. Rather it should be in many (general) people. In the philosophy of the language of trouble has the meaning of noise or rowdy while the trouble is the result of the act of trouble, trouble can already occur by involving only two people, but in the continuation must involve more people. The word *onar* in the Great Dictionary of The Indonesian Language indicates that the trouble includes riots, uproar, commotion, noise, which can be physical riots or non-physical uproars such as debate among the people. What distinguishes between Article 14 of Law No. 1 of 1974 and Article 45 of the ITE Law is the media used to disseminate and the consequences of the news spread is also a differentiator, the first is stipulated in Article 14 of Law No. 1 of 1946 concerning The Regulation of Criminal Law, if a person spreads false news intentionally and causes hatred among the public, the second if a person spreads false news by causing consumer losses in electronic transactions and/or is intended to incite hatred against a particular race, tribe, or religion. The fulfillment of the elements is also supported by various evidence tools as stipulated in Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Law (KUHP).

**Keyword:** Criminal Act, Ruckus, Fake Kingdom.



## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT KEONARAN DIMASYARAKAT OLEH KERATON SEJAGAD DI PURWOREJO”**.

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Almarhumah Bapak Tercinta semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik bagi Bapak, Ibunda Tercinta yang selalu memberikan dukungan baik dukungan materiil maupun non-materiil sehingga penulis terus semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Hartanto, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Risa Ardia, Perempuan yang telah hadir dalam hidup Penulis, mewarnai hari-hari penulis, memberikan semangat dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Maulana Fitrah, Hafidz Herwinadi Putra, dan Muhammad Eriel Christianto yang memberikan bantuan, dukungan, doa dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Surakarta, 10 April 2021

Penulis



**RAHMAT FAJAR MAULANA WIJANARKO**

**NIM. C100160041**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
1. Tujuan Objektif .....	3
2. Tujuan Subjektif .....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Teoritis .....	4
2. Manfaat Praktis.....	4
E. Kerangka Pemikiran .....	5
F. Metode Penelitian .....	7

1. Metode Pendekatan .....	7
2. Lokasi Penelitian .....	8
3. Jenis Penelitian .....	8
4. Jenis Data .....	8
5. Metode Pengumpulan Data .....	9
6. Metode Analisis Data .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur – unsur Tindak Pidana.....	14
3. Macam-Macam Tindak Pidana .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Berita Palsu (Hoax)	
Dan Keonaran .....	17
1. Pengertian Berita Palsu (Hoax) .....	17
2. Hoax Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	20
3. Tindak Keonaran dalam Berita Palsu .....	24
C. Kriminalisasi Tindak Keonaran dan	
Berita Palsu Dalam Hukum Positif.....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Keonaran Dalam	
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946	
tentang Pengatruan Hukum Pidana .....	33
B. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Keonaran	
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946	

Tentang Pengaturan Hukum Pidana .....	44
BAB IV. PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

## DAFTAR PUSTAKA